

**PANDANGAN AHMAD ZAHRO TERHADAP PENGGUNAAN
SEX TOYS BAGI WANITA YANG BERSUAMI**

SKRIPSI

Oleh
Ismayah Anggraini
NIM. C71214081



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ISMAYAH ANGGRAINI

Nim : C71214081

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Keluarga (AS)

Judul Skripsi : Pandangan Ahmad Zahro terhadap Penggunaan Sex
Toys Bagi Wanita Yang Bersuami

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 30 Maret 2018
Saya yang menyatakan,



ISMAYAH ANGGRAINI
NIM. C71214081

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ismayah Anggraini Nim. C71214081 ini dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Negeri Sunan Ampel pada hari selasa tanggal 24 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

H. M. Ghufiron, LC., M.HI.
NIP. 197602242001121003

Penguji II

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III

Kemal Reza S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV

Agus Solikin M.S.I
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 24 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag. M.H.
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh ISMAYAH ANGGRAINI NIM. C71214081
ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Maret 2018
Dosen Pembimbing



H.M. Ghufron, Lc., MHI.
NIP. 197602242001121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ISMAYAH ANGGRAINI
NIM : C71214081
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : anggrainiismaya411@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PANDANGAN AHMAD ZAHRO TERHADAP PENGGUNAAN *SEX TOYS* BAGI WANITA YANG BERSUAMI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis



(ISMAYAH ANGGRAINI)

belum diterbitkan karena masih dalam bentuk penulisan, sehingga secara literature pendapat Prof. Dr. H. Ahmad Zahro MA al-Chafidz tentang hukum onani, masturbasi dan *sex toys* untuk saat ini belum ada.

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro MA al-Chafidz adalah seorang Guru besar bidang Ilmu Fiqh (Hukum Islam) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan salah satu Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Selain itu, beliau juga diamanahi sebagai Rektor Universitas Pesantren Darul ‘Ulum (Unipdu) Jombang serta ketua IPIM (Ikatan Persatuan Imam Masjid Seluruh Indonesia). Prof. Zahro (sapaan akrabnya) juga merupakan merupakan Ulama yang sering mengisi pengajian di berbagai tempat dan membina acara kajian di beberapa stasiun televisi dan radio.

Sebagaimana yang diketahui bahwa ulama berperan penting dalam pembentukan pemikiran dan perilaku umat. Begitupun dengan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro MA, sebagai title dan jabatan yang disandang beliau sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku jamaah beliaudan masyarakat luas. Pandangan beliau mengenai *sex toys* pun bisa jadi kiblat pemikiran umat dalam menghukumi penggunaannya.

Hal ini menarik bagi penulis untuk diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Penggunaan *Sex Toys* bagi Wanita yang Bersuami”.

Bab ketiga, memaparkan pandangan Prof. Dr. Ahmad Zahro MA terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami. Dalam bab ini selain memaparkan mengenai pandangan Prof. Dr. Ahmad Zahro MA. tentang hukum *istimna'* dan mengenai pandangan Prof. Dr. Ahmad Zahro MA. terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami, akan dijelaskan juga tentang dasar hukum yang melatar belakangi pendapat Prof. Dr. Ahmad Zahro MA tersebut.

Bab *keempat*, analisis hukum Islam mengenai pandangan Prof. Dr. Ahmad Zahro MA terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami. Dalam bab ini adalah pemaparan data dengan menganalisis penalaran Prof. Dr. Ahmad Zahro MA terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami terhadap kaidah fiqh dan menganalisis kesesuaian pandangan Prof. Dr. Ahmad Zahro MA mengenai penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami terhadap pendapat ulama empat madzab.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran untuk memperbaiki penelitian selanjutnya.

masalah ibadah, maka kata kuncinya *al-nîyah wa al-tâ'ah*. Sedangkan dalam masalah *mu'âmalah*, maka kata kuncinya *al-'aqd wa al-maṣlahah*. Selain itu, ia juga membuat rumusan untuk memudahkan dalam memandang permasalahan *mu'âmalah*, yaitu “niat, cara, dan akibat”. Segala permasalahan di bidang mu'amalah dapat ditinjau hukumnya dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut. Sebagai ilustrasi dapat dikatakan suatu perbuatan (*mu'âmalah*) dinyatakan sah dan diperbolehkan jika niat atau motivasi yang mendasarinya baik, cara melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dan akibat dari perbuatan tersebut tidak merugikan atau menyalahi ketentuan. Jika salah satu dari “niat, cara, dan akibat” terdapat kesalahan, maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak sah atau dilarang.

Sebagai ulama yang sering mendapatkan pertanyaan dari masyarakat tentang berbagai konsekuensi hukum fiqh atas permasalahan yang mereka hadapi, Ahmad Zahro tidak menegasikan adanya kesenjangan antara aturan formal perundang-undangan dengan aturan fiqh dalam pelaksanaannya. Ahmad Zahro memahami betul bagaimana sebagian masyarakat Muslim kita lebih “patuh” pada fiqh “murni” daripada kepada aturan perundang-undangan yang notabene juga “fiqh” yang berbaju legislasi modern. Dalam menyikapinya, ia mulai menjawab permasalahan tersebut berdasar perspektif fiqh “murni” yang lebih “mengena” dalam kemantapan hati untuk mengamalkannya seraya memberikan pengertian dan pemahaman bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan adalah bentuk

Kedaruratan melakukan *istimna'* terletak jika seseorang memiliki rasa khawatir terjerumus dalam perzinahan jika tidak melakukannya. Namun istihsan dengan darurat ini pun memiliki tingkatannya, yaitu *ḍaruriyat*, *ḥajiyat* dan *taḥsaniyat*. Sedangkan *istimna'* sendiri berada diantara istihsan dengan darurat tingkat *ḍaruriyat* dan *ḥajiyat*, bisa dikatakan termasuk dalam diantara istihsan dengan darurat tingkat *ḍaruriyat* apabila alasan dari melakukan *istimna'* adalah untuk menghindari perzinahan. Dalam artian seseorang tidak memiliki pilihan lain selain melakukan zina apabila ia tidak melakukan *istimna'*. Seperti yang diketahui perzinahan dapat mengancam eksistensi dalam pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasab*).

Adapun *istimna'* termasuk dalam istihsan dengan darurat tingkatan *ḥajiyat*, apabila alasan dari melakukan *istimna'* ini adalah karena seseorang memiliki kekhawatiran terjerumus dalam perzinahan. Karena apabila ia tidak melakukan *istimna'* maka kehidupannya menjadi sulit sedangkan ia takut pada perzinahan.

Kebolehan onani atau masturbasi menurut Ahmad Zahro karena beliau memandang bahwa onani atau masturbasi di satu sisi dapat menjauhi zina dan di sisi lain pada kenyataannya dalam kehidupan banyak pemuda pemudi yang tidak bisa menghindari hal itu dikarenakan belum waktunya menikah atau belum adanya kemampuan untuk menikah maka menurut Ahmad Zahro onani dan masturbasi lebih baik dilakukan. Dan ternyata dalam dunia medis tidak mengganggu kesehatan secara langsung bahkan menurut dokter Boyke, onani atau masturbasi bisa memicuh kesehatan, orang yang biasanya

dan beliau menyarankan untuk melakukan onani atau masturbasi dengan syarat diantara mereka tidak boleh terjadi perselingkuhan maupun perceraian. Karena perceraian memiliki dampak yang luas salah satunya adalah anak yang menjadi korban dan nama baik yang dipertaruhkan. Meskipun perceraian tidak diharamkan tetapi dalam pandangan masyarakat hal tersebut adalah hal yang negatif. Namun jika melakukan onani atau masturbasi dengan menggunakan *sex toys* maka hanya dia dan pasangannya yang mengetahui meskipun tidak sepuas dengan pasangan tetapi Ahmad Zahro yakin bahwa orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dan sudah mencapai orgasme itu akan merasakan kelegaan tersendiri karena tuntutan berat dalam dirinya sudah dikeluarkan.

bagi wanita yang bersuami, melainkan masih pada hukum *istimna'* itu sendiri. Dengan mengetahui hukum *istimna'* menurut ulama madzab maka dapat ditarik kesimpulan mengenai hukum penggunaan *sex toys*, sebagaimana yang diketahui bahwa *sex toys* adalah alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan *istimna'*, sehingga memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

Sebagaimana keterkaitan antara hukum *istimna'* dengan *sex toys*, tidak dapat dipisahkan juga keterkaitan antara hukum keduanya dengan pelaku *istimna'* sekaligus pengguna *sex toys*. Dari hukum keduanya dapat juga diambil kesimpulan mengenai hukum bagi pelaku dan penggunanya. Dalam penelitian ini yang menjadi sorotan adalah wanita yang bersuami, yang secara hukum ia telah memiliki wadah untuk menyalurkan hasrat seksualnya, tetapi masih ada saja yang masih melakukan *istimna'* dengan berbagai alasan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum *istimna'* bagi wanita yang bersuami menurut Ahmad Zahro adalah boleh dengan ketentuan syarat tidak mengganggu kesehatan dan tidak mengganggu hubungan biologis dengan suaminya. Selain syarat tersebut ada syarat lain untuk diperbolehkannya melakukan *istimna'* yaitu bahwa pasangan suami istri tersebut menghadapi keadaan dimana tidak ada jalan lain yang lebih baik untuk mereka menyelamatkan rumah tangga mereka dari perselingkuhan dan perceraian selain melakukan *istimna'*.

